

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
YANG DI PHK AKIBAT UNJUK RASA KERJA
NASIONAL TANPA IJIN PT. OHSUNG (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1115
K/Pdt.Sus-PHI/2017)**

SKRIPSI

**Oleh :
KENNET FAISAL HARAHAHAP
201510115056**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap pekerja yang di
PHK akibat unjuk rasa kerja nasional tanpa ijin
PT. Ohsung (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Nomor : 1115 K/Pdt.Sus-PHI/2017)

Nama Mahasiswa : Kennet Faisal Harahap

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115056

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Pembimbing I



Herybertus Sukartono, SH, MM, MH
NIP : 019909008

Pembimbing II



Anggreany Haryani Putri, SH., MH
NIP : 1712307

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap pekerja yang di
PHK akibat unjuk rasa kerja nasional tanpa ijin
PT. Ohsung (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Nomor : 1115 K/Pdt.Sus-PHI/2017)

Nama Mahasiswa : Kennet Faisal Harahap

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115056

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Ujian Skripsi : 18 Juli 2019

Bekasi, 25 Juli 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Andang Sari, SH, MH
NIP. 10803030

Penguji I : Rahmat Saputra, SH, MH
NIP. 11606049

Penguji II : Anggreany Haryani Putri, SH., MH
NIP. 1712307

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Anggreany Haryani Putri, SH., MH
NIP : 1712307

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Slamet Priyadi, SH., MH
NIP : 19013881

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK AKIBAT UNJUK RASA KERJA NASIONAL TANPA IJIN PT. OHSUNG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1115 K/Pdt.Sus-PHI/2017)”

Adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan Skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 25 Juni 2019

Yang Membuat Pernyataan,




Kennet Faisal Harahap
201510115056

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kennet Faisal Harahap
NPM : 201510115056
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK AKIBAT UNJUK RASA KERJA NASIONAL TANPA IJIN PT. OHSUNG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1115 K/Pdt.Sus-PHI/2017)”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas *royalty non-ekklusif* ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dengan saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 25 Juni 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Kennet Faisal Harahap

v

ABSTRAK

Kennet Faisal Harahap, 201510115056, Skripsi, Perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK akibat unjuk rasa kerja nasional tanpa izin PT. Ohsung (studi kasus putusan pengadilan nomor : 1115 k/pdt.sus-phi/2017)

Pemutusan hubungan kerja karena pekerja mengikuti aksi mogok kerja nasional . Para pekerja yang juga sebagai pengurus serikat pekerja SPEE FSPMI PT. Ohsung sebanyak 5 (lima) orang di putus hubungan kerjanya. penelitian ini tentang perlindungan bagi pekerja yang mengikuti unjuk rasa kerja nasional dan bagaimana akibat hukumnya menurut perundang-undangan Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan cara pendekatan, dengan mengkaji data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian disimpulkan bahwa. Pemutusan Hubungan Kerja karena mengikuti Aksi Mogok Kerja Nasional tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 serta Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui prosedur dan tata cara penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja akibat Mengikuti Aksi Mogok Kerja Nasional dan Apakah dalam putusan Nomor 10/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG dengan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1115 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tentang dalam hal memutus perkara PHK karena mengikuti aksi Mogok Kerja Nasional telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.

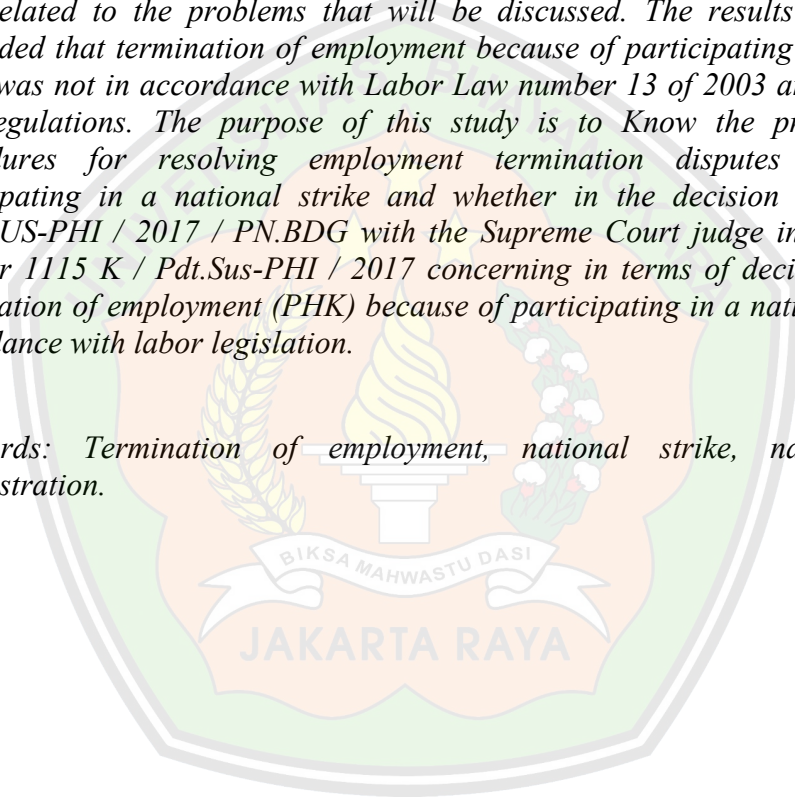
Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Aksi Mogok Kerja Nasional, Unjuk Rasa Kerja Nasional.

ABSTRACT

Kennet Faisal Harahap, 201510115056, Thesis, Legal protection for workers who have been terminated due to national work demonstrations without the permission of PT. Ohsung (case study court decision number: 1115 k / pdt. Sis-phi / 2017)

Termination of employment Because of workers do national strike action. The workers who are also administrators of the SPEE FSPMI union PT. Ohsung as many as 5 (five) people are broken up from work. This research is about protection for workers who take part in national demonstrations and what are the legal consequences according to labor legislation. This research use normative legal methods by approach. By reviewing primary data and secondary data related to the problems that will be discussed. The results of the study concluded that termination of employment because of participating in a national strike was not in accordance with Labor Law number 13 of 2003 and other laws and regulations. The purpose of this study is to Know the procedure and procedures for resolving employment termination disputes because of participating in a national strike and whether in the decision number 10 / PDT.SUS-PHI / 2017 / PN.BDG with the Supreme Court judge in the decision number 1115 K / Pdt.Sus-PHI / 2017 concerning in terms of deciding cases of termination of employment (PHK) because of participating in a national strike in accordance with labor legislation.

Keywords: Termination of employment, national strike, national work demonstration.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Pemutusan Hubungan Kerja akibat mengikuti unjuk rasa kerja nasional tanpa ijin PT. Ohsung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 1115 K/Pdt.Sus-PHI/2017) dengan baik dan benar. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang dapat membangun selalu penulis harapkan. Kelancaran dan terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari Do’a dan bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., MH. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Herybertus Sukartono, SH, MM, MH., selaku dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Anggreany Haryani Putri, SH., MH, selaku Dosen pembimbing teknis yang telah yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua jajaran di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan penting dalam proses belajar saya.
6. Kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Alm. Harlan Harahap, Ibunda tercinta Ratna Dewi Siregar, terimakasih atas pengorbanan, kasih

sayang dan motivasi yang telah diberikan dalam mendidik dan mengasuh tanpa pernah kenal lelah.

7. Istri tercinta Siti Nurpalah, SE, perempuan hebat yang selalu memberikan dukungan, serta anak-anak tersayang, Khansa Fadheella Harahap dan Kineta Nadra Harahap yang telah menjadi motivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dorongan dan nasihat.
9. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Serikat Pekerja SPAMK FSPMI PT. Yamaha Motor Electronics Indonesia yang selalu memberi dukungan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan Karya Tulis ini.

Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan banyak orang, Amin.

Bekasi, 25 Juni 2019



Kennet Faisal Harahap

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah.....	11
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	11
1.2.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	12
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	13
1.4.1 Kerangka Teoritis	13
1.4.1.1 Teori Keadilan dan Kepastian Hukum	13
1.4.1.2 Teori Hukum Ketenagakerjaan.....	14
1.4.1.3 Teori Pemutusan Hubungan Kerja.....	14
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	15
1.4.3 Kerangka Pemikiran	18
1.5 Metode Penelitian	19
1.5.1 Pendekatan Penelitian	19
1.5.2 Sumber dan Jenis Data.....	19

1.5.3	Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	20
1.6	Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		23
2.1	Teori Hukum.....	23
2.2	Teori Keadilan	26
	Teori Keadilan Menurut Para Ahli	28
	Jenis-Jenis Keadilan Menurut Para Ahli	30
2.3	Teori Kepastian Hukum.....	31
2.4	Teori Perlindungan Hukum	33
2.4.1	Perlindungan Pekerja/Buruh	34
2.5	Teori Hukum Ketenagakerjaan	36
2.5.1	Sifat Hukum Ketenagakerjaan	38
2.5.2	Hakikat Hukum Ketenagakerjaan	39
2.5.3	Tujuan Hukum Ketenagakerjaan	40
2.6	Teori Pemutusan Hubungan Kerja.....	41
2.6.1	Macam-Macam Pemutusan Hubungan Kerja	42
2.7	Unjuk Rasa.....	43
2.7.1	Pengertian Unjuk Rasa.....	44
2.7.2	Hak dan Kewajiban dalam Demonstrasi	44
2.7.3	Tata Cara Unjuk Rasa/Demonstrasi	46
2.8	Tinjauan-Tinjauan Ketenagakerjaan	45
2.8.1	Hubungan Industrial	46
2.8.1.1	Pengertian Hubungan Industrial	46
2.8.1.2	Fungsi Pihak Dalam Hubungan Industrial	47
2.8.1.3	Sarana Dalam Hubungan Industrial	49
2.8.2	Serikat Pekerja	50
2.8.2.1	Hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh	51
2.8.2.2	Kewajiban Serikat Pekerja/Serikat Buruh.....	51
2.8.3	Mogok Kerja	51
2.8.3.1	Syarat-Syarat Mogok Kerja.....	53
2.8.3.2	Ketentuan Pelaksanaan Mogok Kerja	53
2.8.4	Perselisihan Hubungan Industrial	55

2.8.4.1	Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial	55
2.8.4.2	Jenis Perselisihan Hubungan Industrial.....	56
2.8.4.3	Prosedur Penyelesaian Perselisihan	57
BAB III HASIL PENELITIAN		60
3.1	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Di PHK Karena Mengikuti Aksi Unjuk Rasa Kerja Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	60
3.1.1	Putusan Pengadilan Nomor 1115K/Pdt.Sus-PHI/2017.....	60
3.1.2	Para Pihak	63
3.1.3	Duduk Perkara	64
3.1.4	Nota Dinas Tenaga Kerja Bidang Pengawasan	68
3.1.5	Anjuran Dinas Tenaga Kerja	70
3.1.6	Petitum.....	72
3.1.7	Eksepsi.....	75
3.1.8	Kasasi.....	78
3.2	Putusan Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Nomor 1115 K/ PDT.SUS-PHI/2017 Yang Membatalkan Putusan PHI Nomor 10/PDT. SUS-PHI/ 2017/PN.BDG Telah Sesuai Dengan Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003.....	84
3.2.1	Putusan PHI Nomor 10/PDT.SUS-PHI/ 2017/PN.BDG	85
3.2.2	Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung dalam memutus Perkara Nomor 1115 K/ PDT.SUS-PHI/2017	87
3.2.2.1	Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.....	87
3.2.2.2	Putusan Mahkamah Agung	90
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN.....		92
4.1	Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Di PHK Karena Mengikuti Aksi Unjuk Rasa Kerja Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.....	92
4.2	Putusan Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Nomor 1115 K/ PDT.SUS-PHI/2017 Yang Membatalkan Putusan PHI Nomor 10/PDT. SUS-PHI/ 2017/PN.BDG Telah Sesuai Dengan Undang –Undang Nomor 13 Tahun.....	111

4.2.1	Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial	111
4.2.2	Organ Pengadilan Hubungan Industrial.....	114
4.2.3	Legal Standing Para Pihak	115
4.2.4	Kewenangan Mengadili	117
4.2.5	Upaya Hukum Pengadilan Hubungan Industrial	118
BAB V PENUTUP		124
5.1	Kesimpulan	124
5.2	Saran	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



MOTTO

**Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,
tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.**

Selama ada keyakinan, semua akan menjadi mungkin



DAFTAR SINGKATAN

UU	Undang-Undang
PHI	Pengadilan Hubungan Industrial
PPHI	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
P4P	Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
P4D	Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PUK	Pimpinan Unit Kerja
KTA	Kartu Tanda Anggota
SK	Surat Keputusan
SP	Serikat Pekerja
SE	Surat Edaran

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Riwayat Hidup Penulis
Lampiran II	Lembar Konsultasi Pembimbing
Lampiran III	Putusan Pengadilan
Lampiran IV	Surat Nomor : 02485/org/DPP/ FSPMI/XI/2015
Lampiran V	Surat Nomor : 284/ORG/PC SPEE FSPMI/XI/2015

